

# **DEMOKRASI PERSPEKTIF HIZB AL-TAHRÎR DAN AL-IKHWÂN AL-MUSLIMÛN**



## **SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**KRISMONO  
NIM: 05360013**

**PEMBIMBING**

**Prof. Dr. H. SUSIKNAN AZHARI, M.A.  
H. WAWAN GUNAWAN, S. Ag., M. Ag.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Gerakan fundamentalisme Islam atau revivalisme Islam yang akhir-akhir ini mulai muncul ke permukaan pasca peristiwa WTC, 11 September 2001 di New York, merupakan fenomena yang terjadi di hampir seluruh dunia Islam. Fenomena ini merupakan ekspresi keinginan umat Islam untuk kembali menjadikan Islam sebagai landasan hidup (*way of life*). Ideologi dan pemikiran gerakan fundamentalisme Islam ini muncul ke permukaan sebagai gerakan alternatif terhadap modernisme dan sekulerisme dengan usaha menerapkan Islam secara *kaffah* menggantikan ideologi Barat yang dipandang tidak relevan dan mampu menyelesaikan permasalahan umat yang kompleks.

Di antara gerakan-gerakan fundamentalisme Islam tersebut yang menarik untuk dikaji adalah Hizb al-Tahrîr dan al-Ikhwân al-Muslimûn. Kedua gerakan tersebut mempunyai visi dan tujuan dakwah yang hampir sama yakni, mendirikan Khilâfah Islâmiyah atau negara Islam serta menegakkan syari'at Islam secara *kaffah* di setiap aspek kehidupannya. Namun, dalam perkembangannya, kedua gerakan tersebut menampilkan atau menggunakan cara yang berbeda untuk mencapai cita-citanya tersebut sebagai bagian dari corak dan karakter khas masing-masing. Menurut Huntington, hal ini merupakan ekses dari masalah-masalah kontekstual transisi demokrasi di dunia global saat ini, dimana problematika ini muncul dari watak masyarakat, budaya, politik dan sejarahnya, serta dalam taraf tertentu bersifat endemik.

Melalui pendekatan sosio-historis dan kajian induktif-analitis-komparatif, perbedaan pandangan antara keduanya terkait dengan demokrasi merupakan suatu hal yang wajar, mengingat keduanya tumbuh dan terbentuk dari kondisi sosio-politik yang berbeda. Trauma historis (beban sejarah) yang berlebihan bagi Hizb al-Tahrîr yang lahir, tumbuh dan berkembang di Palestina menyebabkan ia mempunyai bangunan ideologi yang cenderung revolusioner, ideal-totalistik, dan radikal non-kompromitif terhadap segala sesuatu yang berbau Barat, termasuk demokrasi. Sementara itu, kondisi internal politik Mesir yang menjadi otoritas kaum sekuler, menyebabkan perilaku politik al-Ikhwân al-Muslimûn cenderung moderat, fleksibel, dan kompromitif dengan ikut terlibat dalam pertarungan proses demokratisasi politik di Mesir. Menurut pandangan Ikhwân, dengan memenangkan pemilu dan menguasai kursi di parlemen, cita-cita mereka dapat terwujud. Dengan demikian, Ikhwân menerima demokrasi yang notabene dari Barat sebagai kendaraan untuk mewujudkan cita-citanya tersebut.

Baik Hizbu al-Tahrîr maupun al-Ikhwân al-Muslimûn, keduanya sama-sama mengembangkan dan menyebarluaskan pengaruh ideologinya tersebut hampir di seluruh dunia Islam. Gerakan revivalisme Islam yang bermula dari kawasan Timur Tengah tersebut, dalam prosesnya mengalami pola transmisi dengan modus dan sarana yang beragam. Di Indonesia, terdapat Hizb al-Tahrîr Indonesia (HTI) yang merupakan anak kandung ideologi Hizb al-Tahrîr al-Islamî di Palestina. Sementara itu, gerakan Tarbiyah yang berafiliasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terinspirasi oleh berbagai pemikiran al-Ikhwân al-Muslimûn di Mesir. Dalam praktik demokrasi di Indonesia, keduanya menampilkan perjuangan politik yang berbeda. Hal ini menunjukkan perbedaan di dalam orientasi ideologi dan kerangka pemikiran yang dibangun oleh "orang tuanya."

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR  
Nomor: UIN.02/K. PMH-/P.P. 009 /13/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: **DEMOKRASI PERSPEKTIF HIZB AL-TAHRIR DAN AL-IKHWAH AL-MUSLIMUN**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KRISMONO

NIM : 05360013

Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 3 Februari 2009

Nilai Munaqasyah : 98 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang

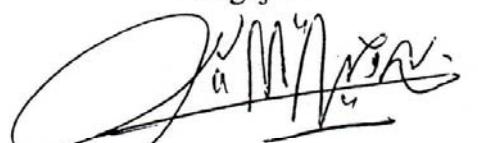
Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A.  
NIP. 150266737

Penguji I



Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag.  
NIP.150275462

Penguji II



Budiyah Ruhiyatudin, SH, M.Hum  
NIP. 150300640

Yogyakarta, 23 Maret 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., P.hD.  
NIP. 150240524

**MOTTO**

**“HIDUP ADALAH IBADAH”**

**Kupersembahkan karya ilmiah ini bagi:**  
Orangtuaku, Sukardi (alm.) dan Sarmi

Kakak-kakakku “pandawa pitu” (Mas Kis, Mas Har, Mas Eko, Mas Pur, Mas Tri, Mas Yuli) Saudara-saudaraku seprofesi di Pos Ojek Medari (Pak Kliwon, Pak Wagimin, Pak Jumadi, Pak Wardi, Pak Yos, Kang Agung dan masih banyak lagi) yang telah memberikan motivasi kepada penyusun untuk lekas jadi sarjana “Tukang Ojek Jadi Sarjana,” begitu elu-elu mereka.

Guru-guruku dan teman-temanku di SD Medari, SMP 1 Sleman, SMA 1 Yogyakarta, Teknik Mesin UGM, dan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu dan “kehidupan” bagi penyusun. *Jazâkumullâh for all, bârakallâhu fî kum.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ  
لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صُلْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ  
وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadirat Allah swt. yang atas berkat dan hidayah-Nya, penyusun mendapatkan kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Demokrasi Perspektif Hizbut Tahrîr dan al-Ikhwâن al-Muslimûn.” Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw. yang telah membawa kita dari kegelapan menuju alam yang terang benderang dan dipenuhi ilmu pengetahuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari uluran tangan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. sebagai Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum. dan Bapak Faturrahman, S. Ag., M.Si., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A. dan H. Wawan Gunawan, S. Ag, M.Ag, sebagai Dosen Pembimbing I dan II yang telah membantu

penyusun dalam menyelesaikan urusan administrasi di bangku perkuliahan.

4. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu selama penyusun berada di bangku perkuliahan dan para karyawan yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan urusan administrasi di bangku perkuliahan.
5. Orang tua penyusun Sukardi (alm.) dan Sarmi yang telah mendidik dan mendorong penyusun untuk selalu menjadi anak yang berguna bagi kedua orangtuanya, agama, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Teman-teman di PMH A maupun B yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah mewarnai kehidupanku dan memberikan tempat untuk saling berbagi suka dan duka.
7. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang mereka berikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terlebih bagi penyusun sendiri.

Yogyakarta, 9 Muharram 1430 H  
6 Januari 2009 M

Penyusun,

**Krismono**  
NIM. 05360013

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>xxii</b>

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18

### **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI**

A. Pengertian Demokrasi	20
B. Demokrasi dalam Perspektif Historis	24
1. Demokrasi di Abad Klasik	24
2. Demokrasi di Abad Pertengahan	30

3. Demokrasi di Abad Modern	32
C. Demokrasi: Ideologi dan Pemikiran	36
D. Demokrasi dalam Pemikiran Politik Barat	38
1. Republikanisme	39
2. Perwakilan ( <i>Representative</i> )	42
3. <i>Welfare State</i>	43
4. Tradisi Mayoritas	45
E. Demokrasi dalam Pemikiran Politik Islam	47
1. Diskursus Islam dan Demokrasi	50
a. Aliran Islam Konservatif (Kontra-Demokrasi)	53
b. Aliran Islam Moderat (Pertengahan)	57
c. Aliran Islam Liberal (Pro-Demokrasi)	61
2. <i>Syûrâ</i> dan Demokrasi	66
a. <i>Syûrâ</i> Elemen Demokrasi	70
b. <i>Syûrâ</i> Bukan Demokrasi	72

### **BAB III: SEKILAS TENTANG HIZB AL-TAHRÎR DAN AL-IKHWÂN AL-MUSLIMÛN**

A. Melacak Akar Sejarah Fundamentalisme Islam: Sebuah Pengantar	74
B. Hizb al-Tahrîr	81
1. Sejarah Kelahiran	81
2. Pertumbuhan dan Perkembangan	87
3. <i>Manhâj</i> dan Karakteristik Gerakan	90
4. Pemikiran Politik	98

a. Partai dan Multipartai	99
b. Sistem Pemerintahan	105
c. <i>Dâr al-Islâm</i> dan <i>Dâr al-Harb</i>	108
d. Hubungan antara Penguasa dan Rakyat	110
e. Demokrasi	111
C. Al-Ikhwân Al-Muslimûn	115
1. Sejarah Kelahiran	115
2. Pertumbuhan dan Perkembangan	117
3. <i>Manhâj</i> dan Karakteristik Gerakan	123
4. Pemikiran Politik	129
a. Partai dan Multipartai	132
b. Sistem Pemerintahan	137
c. Parlemen	140
d. Demokrasi	142

#### **BAB IV: MENJELAJAHI PARADIGMA POLITIK HIZB AL-TAHRÎR DAN AL-IKHWÂN AL-MUSLIMÛN TENTANG DEMOKRASI**

A. Deskripsi Geografis dan Sosio-Politik Palestina dan Mesir	149
1. Palestina	149
a. Periode Pra-1920 : Zionisme dan Kekalahannya Ottoman	152
b. Periode 1920-1948 : Terbentuknya Negara Israel	156
c. Periode 1948-2000 : Konflik Intern Tak Berujung dan Perjanjian Damai yang Impoten	160
2. Mesir	166

a. Periode Pra-1900 : Kolonialisme Barat dan Liga Islam	168
b. Periode 1900-1952: Nasionalis Sekuler Versus Reformis Islam	170
c. Periode 1952-1990 : Menuju Mesir Modern	173
<b>B. Analisis Historis Hizb al-Tahrîr dan al-Ikhwân al-Muslimûn</b>	
Tentang Demokrasi	175
<b>C. Apresiasi terhadap Kedua Gerakan tentang Demokrasi</b>	188

**BAB V: PENGARUH HIZB AL-TAHRÎR DAN AL-IKHWÂN AL-MUSLIMÛN DALAM PRAKTIK DEMOKRASI DI INDONESIA**

<b>A. Deskripsi Pola Transmisi Ulama Timur Tengah di Nusantara</b>	193
1. Pola Interaksi Ekonomi	194
2. Pola Interaksi Politik	198
3. Pola Interaksi Intelektual Keagamaan	201
<b>B. Alumni Timur Tengah dan Revivalisme Islam di Indonesia</b>	203
1. Gerakan Paderi: <i>Prototype</i> Revivalisme Islam di Indonesia	204
2. Gerakan Modern Islam: Gerakan Pendidikan dan Sosial	207
3. Gerakan Islam Baru: Islam Politik Produk Timur Tengah	215
<b>C. Potret Hizb al-Tahrîr Indonesia (HTI) dan Gerakan Tarbiyah (PKS)</b>	217
1. Fenomena Islam Kampus: Dari Gerakan Menuju Politik	218
2. Pola Jaringan dan Kaderisasi	223
3. Implementasi Kedua Gerakan dalam Praktik Demokrasi di Indonesia	227

**BAB VI: PENUTUP**

A. Kesimpulan 236

B. Saran-Saran 239

**DAFTAR PUSTAKA 242****LAMPIRAN-LAMPIRAN:**

I. Terjemahan i

II. Biografi Ulama iii

III. Curiculum Vitae iv

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b> Struktur Negara Khilâfah dan Fungsinya	107
<b>Tabel 3.2</b> Pelaksanaan Muktamar al-Ikhwân al-Muslimûn dan Agenda	
Utamanya	120
<b>Tabel 3.3</b> Profil Singkat Hizb a-Tahrîr dan al-Ikhwân al-Muslimûn	146
<b>Tabel 4.1</b> Periodesasi Peristiwa Penting Perpolitikan di Palestina	164
<b>Tabel 4.2</b> Perbandingan Paradigma Politik Hizb al-Tahrîr dan	
al-Ikhwân al-Muslimûn tentang Demokrasi	190

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar. 3.1</b> Proses Terbentuknya Partai Politik Ideologis Menurut	
Hizb al-Tahrîr	104
<b>Gambar 3.2</b> Tahapan Tahapan Dakwah al-Ikhwân al-Muslimûn	127
<b>Gambar 3.3</b> Karakteristik Dakwah al-Ikhwân al-Muslimûn	128
<b>Gambar 4.1</b> Peta Palestina	149
<b>Gambar 4.2</b> Peta Mesir	166

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah risalah Tuhan yang sempurna dan paripurna yang turun dari langit untuk mengatur seluruh aspek dan problematika kehidupan manusia yang tidak terbatas dalam setiap ruang dan waktunya. Islam juga risalah bagi manusia dalam setiap fase kehidupan dan wujudnya. Ini sebuah fenomena lain dari fenomena-fenomena *syumâliyah al-Islâm* (integritas Islam).<sup>1</sup> Artinya, Islam merupakan agama yang universal, menyeluruh, sudah lengkap, dan sempurna (*kaffah*).<sup>2</sup>

Namun, Islam yang satu dari ajaran itu dalam kenyataan hidup para pemeluknya menunjukkan ekspresi dan aktualisasi yang beragam, sehingga muncul fenomena “*Islâm*” (*nakirah*) versus “*al-Islâm*” (*ma’rifat*), yang menggambarkan realitas kemajemukan Islam. Bagi kaum Muslim memang hanya ada satu Islam yang diwahyukan dan dimandatkan Tuhan, tetapi terdapat banyak penafsiran tentang Islam.<sup>3</sup> Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam kenyataan tumbuh beragam kepercayaan, praktik-praktik, masalah-masalah, perkembangan-perkembangan, dan

---

<sup>1</sup> Yûsuf al-Qardâwî, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, alih bahasa Rofi’ Munawar dan Tajuddin, cet. ke-1, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 121.

<sup>2</sup> Baca, al-Mâidah (5): 3

<sup>3</sup> John L. Esposito, *Islam Warna-Warni: Ragam Ekspresi Menuju “Jalan Lurus” (al-Sîrât al-Mustaqîm)*, alih bahasa Arif Maftuhin, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. xv-xvi.

gerakan-gerakan yang menyediakan sejumlah penilaian tentang agama yang telah mengilhami dan mencerahi kehidupan sebagian besar komunitas di dunia ini.<sup>4</sup>

Salah satu aspek atau dimensi dari keintegralistik Islam ini yang menjadi pembahasan *debatable* dalam wacana kontemporer sekarang ini adalah mengenai konsep politik Islam (*siyâsah syar'iyyah*). Menurut Olivier Roy, perdebatan mengenai politik Islam tidak lepas dari bayang-bayang pemikiran bahwa; *pertama*, Islam dan politik itu tidak bisa dipisahkan; *kedua*, Islam dan politik itu bisa dipisahkan; dan *ketiga*, Islam dan politik mempunyai keterkaitan yang erat, akan tetapi bentuk hubungannya tidak bersifat legal-formalistik, tetapi substansialistik.<sup>5</sup> Perbincangan tentang masalah ini, paling tidak telah menimbulkan dua arus utama pemikiran politik diantara ahli fikih dan kalangan intelektual yang konsen dengan kajian politik Islam.

Arus pertama adalah mereka yang mendukung interpretasi “liberal” yang berupaya untuk menunjukkan keserasian Islam dengan nilai-nilai modernisme yang berlaku, lebih tepatnya dengan sistem politik Barat. Para pendukung arus ini melihat kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan mereka dari sudut pandang sekuler dengan menyuguhkan analisis yang penuh optimis atas nilai-nilai Barat, dan mengukuhkannya sebagai konsep Islam. Singkatnya, arus ini tidak memberi peluang kepada warisan politik Islam untuk berkembang dan berevolusi.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Haedar Nashir, “Gerakan Islam Syari’at: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia,” Disertasi Doktor Universitas Gadjah Mada (2006), hlm. 2.

<sup>5</sup> Bahtiar Effendi, “Disartikulasi Pemikiran Politik Islam?” dalam Olivier Roy, *Gagalnya Islam Politik*, alih bahasa Harimurti dan Qomarudin SF., (Jakarta: Serambi, t.t.), hlm. vi.

<sup>6</sup> Ahmad Vaezy, *Agama Politik: Nalar Politik Islam*, alih bahasa Ali Syahab, cet. ke-1, (Jakarta: Citra, 2006), hlm. 2-3.

Arus kedua dalam pemikiran ini sering dikategorikan sebagai revivalisme atau fundamentalisme yang mengusung reaksi ekstrim terhadap meluasnya ide-ide pemikiran Barat ke dalam dunia Islam.<sup>7</sup> Para pendukung arus ini secara mutlak menolak liberalisme parlementer dan ideologi-ideologi Barat lainnya. Mereka mendukung adopsi yang komprehensif dari sumber-sumber yang bersifat ilahiyyah yang sakral sebagai suatu cara untuk mengakhiri hegemoni Barat, dan sekaligus berupaya mengatasi berbagai masalah sulit yang dihadapi masyarakat muslim.<sup>8</sup>

Pada hakikatnya mengkomparasikan karakter dari kedua arus tersebut menunjukkan sesuatu yang berlebihan baik secara positif maupun negatif, *vis a vis* modernisme dan cara hidup Barat terutama dalam ranah politik.<sup>9</sup> Pendukung arus

---

<sup>7</sup> Istilah revivalisme atau fundamentalisme Islam ini sering disamakan dengan istilah radikalisme Islam dan sebagian yang lain menyebutnya dengan kaum “Islamis.” Istilah “fundamentalisme” biasanya dipakai baik oleh kalangan akademisi maupun mass media untuk menunjuk pada gerakan-gerakan Islam politik yang berkonotasi negatif seperti: “radikal, ekstrem, dan militan” serta “anti Barat atau Amerika.” Namun, tidak jarang pula julukan “fundamentalisme” diberikan kepada semua orang Islam yang menerima al-Quran dan al-Hadis sebagai jalan hidup mereka. Dalam konteks religio-politik dunia Islam, fundamentalisme adalah revivalisme Islam (*Islamic Revivalism*) sebagai bentuk kebangkitan Islam politik. Para penulis Barat pada umumnya mengaitkan istilah fundamentalisme Islam dengan berbagai gerakan dan kecenderungan yang mengajak untuk mengaplikasikan syari’ah Islam dalam semua aspek kehidupan secara *rigid*. Ajakan ini termasuk upaya mendirikan negara Islam yang akan menjamin pelaksanaan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menolak keras pengaruh budaya Barat dalam kehidupan sehari-hari. Achmad Jainuri, “Memahami Fundamentalisme Agama,” dalam Achmad Jainuri (ed.), *Terorisme dan Fundamentalisme Agama: Sebuah Tafsir Sosial*, cet. ke-1, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), hlm. 14. Esposito seorang peneliti dan pengamat politik Islam, tidak sepakat dengan istilah fundamentalisme Islam. Menurutnya, istilah fundamentalisme memiliki pengertian yang selalu generik karena semua yang menghendaki untuk kembali ke kepercayaan dasar atau dasar-dasar suatu agama dapat dikatakan fundamentalisme. Selain itu, pengertian dan persepsi tentang fundamentalisme sangat dipengaruhi oleh Protestanisme Amerika. Lihat, John L. Esposito, *Ancaman Islam: Mitos dan Realitas*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 17.

<sup>8</sup> Ahmad Vaezy, *Agama Politik: Nalar Politik Islam*, hlm. 2.

<sup>9</sup> Dari hasil analisis, pengkomparasian kedua arus tersebut ternyata yang terjadi perbedaan lebih mudah tampak daripada persamaannya, terutama jika doktrin-doktrin Islam fundamentalis dikontraskan dengan pandangan-pandangan sekuler Barat. Pembandingan seperti ini biasanya menimbulkan ketegangan dan tidak menghasilkan apa-apa. Pada umumnya justru menghasilkan saling tuduh, sementara para modernis Barat menuding Islam sebagai anti demokrasi, mendukung kekuasaan *tiran* para pemuka agama, membatasi hak-hak wanita dan menghambat penyelidikan ilmiah. Sedang para ahli Islam fundamentalis membela dengan mengatakan bahwa praktik-praktik modern

pertama dalam bangunan ideologinya mereka memisahkan diri dari pemikiran politik Islam klasik dan mengadopsi ideologi-ideologi seperti nasionalisme, pan-Arabisme, sosialisme, dan Marxisme yang selanjutnya mengukuhkannya sebagai konsep Islam alternatif. Di sisi lain, arus kedua yang memiliki aspirasi yang kuat untuk menegakkan sebuah pemerintahan dan masyarakat Islam yang murni dengan melakukan politisasi agama, telah memunculkan fundamentalisme Islam, suatu fenomena yang muncul ke permukaan dalam khazanah politik internasional sebagai bentuk kebangkitan Islam Politik.<sup>10</sup>

Munculnya gelombang kebangkitan Islam ini bersamaan dengan gelombang demokratisasi yang memiliki implikasi serius mengenai perdebatan hubungan Islam dan demokrasi dalam konstelasi politik global (internasional). Faktanya, di mana-mana pembicaraan Islam dan demokrasi menjadi diskusi yang amat menarik.<sup>11</sup> Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mendiskusikan hubungan Islam dan demokrasi di antara sesama kelompok fundamentalisme Islam.

---

sebenarnya korup dan tidak adil. Sistem politik Barat secara prinsip tidak berfungsi dan mudah dimanipulasi untuk kepentingan pribadi yang sempit, bahkan sangat rendah. Wanita di masyarakat Barat menderita akibat masyarakat yang korup dan kehilangan kemanusiaannya dan berlindung dengan memanfaatkan teknologi untuk tujuan-tujuan yang eksploratif, berbahaya, dan bahkan sembrono. Lihat, John L. Esposito (ed.), *Islam dan Perubahan Sosial-Politik di Negara yang sedang Berkembang*, alih bahasa Wardah Hafidz, cet. ke-1, (Yogyakarta: PLP2M, 1985), hlm.37.

<sup>10</sup> Olivier Roy cenderung menafsirkan ‘Islam Politik’ sebagai aktivitas kelompok yang meyakini Islam sebagai agama sekaligus sebagai ideologi politik, “the activist groups who see in Islam as much a political ideology as a religion.” Lihat, Olivier Roy, *Gagalnya Islam Politik*, alih bahasa Harimurti dan Qomarudin SF., (Jakarta: Serambi, t.t.), hlm. 3. Sedikit berbeda dengan Esposito, Roy merujuk Islam politik pada apa yang ia sebut sebagai gerakan neo-fundamentalisme yang antara lain menghendaki pemberlakuan syari’at Islam. Lihat, Endang Turmudi dan Riza Sihbudi (ed.), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: LIPI Press, 2004), hlm. 53. Lain halnya dengan Haedar Nashir yang mendefinisikan ‘Islam Politik’ dengan aktivisme kelompok Islam yang secara khusus bergerak langsung dalam perjuangan politik kekuasaan sebagaimana ditunjukkan oleh partai-partai Islam. Dalam praktiknya ‘Islam Politik’ sama dan sebangun dengan ‘Islam Ideologis.’ Lihat, Haedar Nashir, *Manifestasi Gerakan Tarbiyah: Bagaimana Sikap Muhammadiyah?*, cet. ke-6, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), hlm. 4.

<sup>11</sup> Khamami Zada dan Arif B. Arofah, *Diskursus Politik Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: LSIP, 2003), hlm. 34.

Di antara gerakan kelompok fundamentalisme Islam tersebut yang menarik untuk dikaji dan diteliti adalah Hizb al-Tahrîr dan al-Ikhwân al-Muslimûn. Kedua kelompok tersebut mempunyai kesamaan dalam hal cita-cita dan tujuan dakwahnya, yaitu sama-sama mendirikan Daulah Islâmiyah atau Khilâfah Islâmiyah. Namun, dalam proses atau cara menuju cita-citanya tersebut keduanya mempunyai perbedaan. Al-Ikhwân al-Muslimûn menggunakan kendaraan demokrasi untuk mencapai cita-citanya, sehingga dalam praktik berpolitiknya, Ikhwân (sebutan ringkas al-Ikhwân al-Muslimûn) membolehkan anggotanya untuk mendirikan partai, masuk dalam parlemen dan berpartisipasi dalam pemilu yang mana semua itu merupakan anasir dari demokrasi. Menurut kelompok ini demokrasi sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Adapun Hizb al-Tahrîr untuk mencapai cita-citanya menolak ideologi atau pemikiran yang berasal bukan dari Islam, termasuk demokrasi. Kelompok ini menganggap bahwa demokrasi merupakan produk Barat yang kufur, sumber utama kedaulatan dalam ideologi ini mutlak di tangan rakyat. Hal ini bertentangan dengan prinsip ajaran Islam bahwa kedaulatan ada di tangan Tuhan (*syara'*). Oleh karena itu, dalam praktik berpolitiknya Hizb (sebutan ringkas Hizb al-Tahrîr) mengharamkan parlemen dan keikutsertaannya dalam pemilu. Perbedaan pandangan kedua kelompok tersebut adalah sesuatu yang wajar dalam kancah perpolitikan dewasa ini yang melibatkan banyak faktor eksternal yang mengitarinya. Salah satu faktor yang berperan besar dalam mewarnai ideologi dan pemikiran mereka adalah faktor sosio-historis, yaitu faktor kultur dan sosial masyarakat serta faktor sejarah yang dibangun atas dasar prinsip ideologi mereka.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang terkait dengan judul skripsi yang relevan untuk di kaji dalam bentuk karya ilmiah. Permasalahan yang problematik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Hizb al-Tahrîr dan al-Ikhwân al-Muslimûn mempunyai pandangan yang berbeda tentang demokrasi?
2. Bagaimana pengaruh ideologi dari kedua kelompok tersebut dalam praktik demokrasi di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Memahami latar belakang perbedaan pandangan kedua kelompok tersebut dalam pandangannya terhadap demokrasi.
2. Menjelaskan analisis kedua kelompok tersebut dalam pandangannya terhadap demokrasi.
3. Menjelaskan pengaruh dari kelompok tersebut tersebut dalam pandangannya terhadap demokrasi di dalam kehidupan bernegara khususnya di Indonesia.

Adapun manfaat atau kegunaan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Memberikan referensi (khazanah pemikiran dan kepustakaan) bagi para aktivis dakwah, peneliti maupun civitas akademik dalam masalah

demokrasi, khususnya pandangan demokrasi menurut Hizb al-Tahrîr dan al-Ikhwân al-Muslimûn.

2. Memberikan evaluasi yang mendalam tentang masalah demokrasi dari kedua kelompok tersebut.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Kajian atau penelitian yang mengkaji dan menelaah tentang Hizb al-Tahrîr dan al-Ikhwân al-Muslimûn sudah terlalu banyak, akan tetapi yang secara khusus (spesifik) memperbandingkan antara Hizb al-Tahrîr dan al-Ikhwân al-Muslimûn, menurut sepengetahuan penyusun selama ini masih belum ada. Kajian atau penelitian yang dilakukan masih bersifat umum dan tidak ada pengkomparasian. Hal ini bisa dibaca antara lain:

Studi yang dilakukan Fathi Osman dalam bukunya “Ikhwan & Democracy: Ikhwân al-Muslimîn Membedah Demokrasi.”<sup>12</sup> Buku ini secara umum sangat baik dalam hal menjelaskan latar belakang sosio-historis dan kondisi perpolitikan Mesir pasca terbentuknya al-Ikhwân al-Muslimûn serta sikap Ikhwân terhadap demokrasi, namun demikian, dalam membangun argumennya buku ini hanya merujuk pada pendapat Hasan al-Bannâ (pendiri Ikhwân) saja dan tidak pada tokoh-tokoh yang lain. Di samping itu, buku ini tidak menjelaskan secara terperinci tentang prinsip-prinsip demokrasi Ikhwân dan argumen-argumen yang mendasari tentang penerimaannya terhadap demokrasi.

---

<sup>12</sup> Fathi Osman, *Ikhwân & Democracy: Ikhwânul Muslimîn Membedah Demokrasi*, alih bahasa Nasmany L. Anas, cet. ke-1, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005).

Studi yang lain dilakukan oleh Taufiq Yûsuf al-Wa'î dalam bukunya yang berjudul “*al-Fîkr as-Siyâsi al-Mu'âsir 'inda al-Ikhwân al-Muslimûn (Dirâsat Tahlîliyah Maidâniyat Muwâsaqat)*” dalam edisi Indonesia diterjemahkan dengan judul, “Pemikiran Politik Kontemporer al-Ikhwân al-Muslimûn: Studi Analitis, Observatif, Dokumentatif.”<sup>13</sup> Buku ini secara lengkap menjelaskan pemikiran dan sikap al-Ikhwân al-Muslimûn terhadap wacana perpolitikan sekarang ini. Masalah demokrasi dalam buku ini hanya dijelaskan secara umum. Walaupun begitu, buku ini sangat membantu bagi penyusun dalam menganalisis, apalagi buku ini merupakan produk resmi jamaah al-Ikhwân al-Muslimûn.

Buku yang lain berjudul, “Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis”<sup>14</sup> merupakan penelitian yang dilakukan oleh Sukron Kamil. Buku ini menjelaskan secara lengkap tentang sejarah demokrasi dari abad klasik sampai modern dan sejarah demokrasi pada masa Nabi Saw. hingga masa pasca Khulâfau ar-Rasyîdûn. Di samping itu, buku ini juga mengulas secara panjang lebar tentang hubungan antara Islam dengan demokrasi serta *debatale* (pro dan kontra) pandangan ulama dan para pemikir Islam tentang demokrasi. Namun demikian, buku ini tidak menguraikan secara spesifik pandangan kaum fundamentalisme Islam terhadap demokrasi, hanya menampilkan beberapa tokoh saja dari kaum fundamentalis.

Studi komparatif tentang demokrasi yang ditulis oleh Idris Thaha yang berjudul. “Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien

---

<sup>13</sup> Taufiq Yûsuf al-Wa'î, *Pemikiran Politik Kontemporer al-Ikhwân al-Muslimûn: Studi Analitis, Observatif, Dokumentatif*, alih bahasa Wahid Ahmadi dan Arwani Amin, cet. ke-1, (Solo: Era Intermedia, 2003).

<sup>14</sup> Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002).

Rais,”<sup>15</sup> Buku ini secara detail menjelaskan hubungan antara demokrasi dan *syūrā* dan pandangan kedua tokoh tersebut tentang demokrasi. Dalam hal sistematika dan analisis komparatifnya, buku ini cukup bagus. Namun penulis dalam kajiannya tidak sampai membahas pandangan kedua tokoh tersebut tentang demokrasi dalam pandangan kaum Islamis (fundamentalis) seperti, Hizb al-Tahrîr, al-Ikhwân al-Muslimûn dan Jemâ’at al-Islâmî. Padahal Kelompok-kelompok tersebut mempunyai pandangan yang unik dalam interpretasinya tentang demokrasi.

Studi lain yang dilakukan oleh Khamami Zada dan Arif B. Arofah yang berjudul, “Diskursus Politik Islam,”<sup>16</sup> telah menampilkan deskripsi yang menarik tentang wacana dan perdebatan politik yang berlangsung hingga saat ini. Dalam buku tersebut mereka mengulas secara singkat al-Ikhwân al-Muslimûn, Hizb al-Tahrîr dan beberapa gerakan Islam lainnya, dari sisi sejarah kelahiran, *manhâj* dan karakteristik gerakan, bangunan ideologinya, serta metode dakwahnya. Di samping itu, di buku tersebut juga dibahas tentang perdebatan konsep *syûra* dan demokrasi. Namun demikian, buku tersebut masih belum mengulas secara terperinci tentang demokrasi dari pandangan kaum fundamentalisme Islam.

Muhammad Diauddîn ar-Râis dalam bukunya yang berjudul *an-Nazâriyâh as-Siyâsatu al-Islâmiyyah*, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul, “Teori Politik Islam.”<sup>17</sup> Buku ini termasuk buku yang paling baik

---

<sup>15</sup> Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais*, cet. ke-1, (Jakarta: Teraju, 2005).

<sup>16</sup> Khamami Zada dan Arif B. Arofah, *Diskursus Politik Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: LSIP, 2003).

<sup>17</sup> M. Diauddîn ar-Râis, *Teori Politik Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

dalam menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan antara Islam dan demokrasi, tetapi buku ini hanya sekedar menjelaskan argumen-argumen yang mendasarinya tanpa menyebutkan dan menyinggung lebih jauh pandangan kaum fundamentalis Islam dalam pandangannya tentang hubungan antara Islam dengan demokrasi.

Kajian tentang Hizb al-Tahrîr diantaranya disertasi oleh Syamsul Arifin yang berjudul “Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalis: Pengalaman Hizbu al-Tahrîr Indonesia.”<sup>18</sup> Sebagaimana yang ditulis penulisnya sendiri dalam masalah keterbatasan studi, buku ini kurang bisa mengungkapkan sisi-sisi kedalaman Hizb al-Tahrîr dan hanya terfokus pada kelompok ini saja. Meski demikian, buku ini telah memberikan apresiasi yang menarik bagi penyusun untuk mengetahui inti jaringan dan pola gerakan sosial Hizb al-Tahrîr, khususnya Hizb al-Tahrîr Indonesia (HTI).

Haedar Nashir dalam disertasinya yang berjudul “Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia”<sup>19</sup> mengulas tentang gerakan formalisasi penerapan syariat Islam di Indonesia. Hal ini sangat terkait dengan Hizb al-Tahrîr dengan Hizb al-Tahrîr Indonesia dan al-Ikhwân al-Muslimûn yang berafiliasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berkeinginan untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia secara *kaffah*. Buku ini juga mengulas tentang proses kehadiran gerakan Islam syariat tersebut di tengah dinamika dan relasi sosial masyarakat Indonesia.

---

<sup>18</sup> Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalis: Pengalaman Hizbu al-Tahrîr Indonesia*, cet. ke-1, (Malang: UMM Press, 2005).

<sup>19</sup> Haedar Nashir, “Gerakan Islam Syari’at: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia,” disertasi doktor Universitas Gadjah Mada (2006).

Untuk mengetahui pola transmisi (jaringan) Hizb al-Tahrir dan al-Ikhwan al-Muslimun dari Timur Tengah ke Indonesia dalam hubungannya dengan praktik dan prospek demokrasi di Indonesia, buku yang menarik tentang hal itu adalah tesis yang dilakukan oleh M. Imdadun Rahmat yang berjudul, “Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia.”<sup>20</sup> Di dalam buku ini juga mengulas mengenai beberapa fenomena revivalisme di Indonesia beserta ciri dan watak keagamaan dari masing-masing gerakan.

Di samping itu, tesis yang dilakukan oleh M. Zaki Mubarak yang berjudul, “Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi,”<sup>21</sup> melengkapi pembahasan penelitian ini mengenai kondisi perpolitikan pasca orde baru atau reformasi, beserta pengaruh dan implementasi ideologi gerakan radikal tersebut dalam praktik demokrasi di Indonesia.

## E. Kerangka Teoretik

Fundamentalisme sering dialamatkan pada Islam. Para pemikir kontemporer Islam telah menerima istilah tersebut dalam bahasa Arab modern yaitu, *al-usûliyah*. Berdasarkan pada konsep *usûl* (fundamentals, *roots*, atau prinsip) yang seumur Islam itu sendiri.<sup>22</sup> Biasa juga disebut dengan *as-safwâh al-Islâmiyah* yang berarti

---

<sup>20</sup> M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2005)

<sup>21</sup> M. Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*, (Jakarta: LP3ES, 2008).

<sup>22</sup> Ishomuddin, “Fundamentalisme Agama sebagai Fenomena Keagamaan dan Budaya,” dalam Achmad Jainuri (ed.), *Terorisme dan Fundamentalisme Agama*, hlm. 98.

kebangkitan Islam untuk mendeskripsikan Islam politik.<sup>23</sup> Para fundamentalis mengadopsi julukan itu dengan menambah *ism* (dalam bahasa Arab *iyyah*) pada *usûl* (dasar) untuk memperjelas bahwa tujuan mereka adalah menciptakan dasar-dasar Islam dalam garis kehidupan masyarakat Muslim.<sup>24</sup>

Dalam konteks kultural, kaum fundamentalisme Islam ini berupaya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang murni (*purifying society*) dari pengajaran dan praktik-praktik tidak Islam (*un-Islamic teaching and practices*) dengan mengembalikan semua permasalahan kepada sumber-sumber murni Islam (*Islam's original pure resources*) yang digali dari al-Quran dan al-Hadis.<sup>25</sup> Adapun dalam konteks struktural, agama diarahkan untuk mewujudkan negara Islam modern (*an ideal Islam state*) sebagaimana pernah diandaikan pada zaman Nabi dan para sahabatnya (*modeled on that of prophet and his companions*). Lebih dari itu, orientasi struktural adalah munculnya pengislaman sistem sosial dan politik secara total dalam tatanan masyarakat dan negara syariah.<sup>26</sup>

Fundamentalisme Islam dalam proses kemunculannya sangat dipengaruhi oleh proses demokratisasi dalam negeri. Ketika demokrasi mampet, terhambat atau kembali menjadi sistem yang otoriter, maka akan memunculkan gerakan fundamentalisme Islam. Di sini secara sosio-historis adanya keterkaitan antara fundamentalisme Islam dengan demokrasi. Dengan kata lain, munculnya

---

<sup>23</sup> Bassam Tibi, *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*, alih bahasa Imran Rasyidi dkk., (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 2000), hlm. 66.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

fundamentalisme Islam ini merupakan reaksi atas ketidakmampuan demokrasi yang pro-Barat dalam mengatur stabilitas politik dan pemerintahan khususnya negara-negara Muslim, yang mempunyai kultur, kondisi politik dan sejarah yang berbeda dengan Barat.

Istilah demokrasi berasal dari kata-kata Yunani *demos* (rakyat) dan *kratia* (pemerintahan), jadi demokrasi secara harfiah berarti “pemerintahan oleh rakyat.” Demokrasi dengan demikian suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan tersebut secara langsung atau tidak langsung hanya dapat terejadi jika disetujui secara bebas oleh mayoritas masyarakat dewasa.<sup>27</sup> Dengan kata lain, bahwa doktrin politik menempatkan rakyat dipercaya memiliki kapasitas yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan dan mengatur masyarakat.<sup>28</sup>

Konsep demokrasi telah mengalami perubahan dan perkembangan terus menerus dan gerakan perkembangannya bersumber dari gerakan perkembangan sejarah yang tidak pernah berhenti. Pada setiap masa, bahkan di tengah-tengah satu masa, terdapat suatu konsep yang jika tidak bertentangan, sekurang-kurangnya

---

<sup>27</sup> Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*, cet. ke-1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 16. Istilah demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani, *demos* yang berarti “rakyat”, dan *kratia* yang berarti “pemerintahan”, menjadi masalah, apakah *demos* itu benar-benar berarti “rakyat” sebagaimana yang dipahami selama ini? Tampaknya tidak. Apa yang sesungguhnya dianggap sebagai “rakyat” di Yunani Kuno (Athena), menurut Dahl, berbeda sekali dengan apa yang mungkin dipahami bila sekarang disebut dengan kata “rakyat”. Bagi orang Yunani Kuno, “rakyat” tidak lebih dari sekumpulan manusia dari sebuah *polis* atau kota kecil. Hal tersebut membawa konsekuensi logis bahwa apa yang disebut sebagai demokrasi dalam pengertian “asli” –nya pun berbeda dengan demokrasi dalam pemahaman kontemporer. Baca penjelasan selengkapnya Riza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah*, cet. ke-1, (Jakarta: Mizan, 2007), hlm. 3.

<sup>28</sup> Ahmad Vaezy, *Agama Politik: Nalar Politik Islam*, hlm. 193.

berbeda dengan konsep sebelumnya.<sup>29</sup> Hal ini wajar apalagi kalau terma demokrasi ini dihubungkan dengan objek tertentu, misalnya demokrasi dengan agama (Islam).

Dalam perspektif dan penelusuran sejarah inilah, bisa diambil pemetaan perbedaan di kalangan umat Islam berkenaan dengan hubungan agama dan demokrasi. Kelompok pertama berpandangan bahwa konsepsi ajaran Islam sejalan dengan konsepsi paham demokrasi. Dengan kata lain, konsepsi demokrasi sebenarnya melekat dalam ajaran Islam.<sup>30</sup> Kelompok kedua melihat demokrasi sebagai paham dan konsep yang mulia, tetapi mengakui kenyataan bahwa demokrasi kontemporer mengandung bias pemikiran sekuler Barat, sehingga masih perlu diisi serta diberi jiwa islami. Artinya, perlu dikembangkan pola “teo-demokrasi” (demokrasi yang berketuhanan). Kelompok ketiga adalah yang menentang dan menolak demokrasi, dengan alasan prinsip-prinsip demokrasi bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Perbedaan umat Islam dalam pemetaan hubungan antara Islam dan demokrasi di atas selaras dengan apa yang diproyeksikan A. Luthfi asy-Syaukani dengan mengemukakan tiga tipologi pemikiran yang mewarnai wacana pemikiran Arab kontemporer.<sup>31</sup> Tipologi tersebut antara lain: *pertama*, tipologi tansformatik, yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam yang menganjurkan dilakukannya proses transformasi masyarakat muslim Arab dari budaya tradisional patriarkal ke budaya

<sup>29</sup> Muhammad Abed al-Jabirî, *Syura: Tradisi Partikularitas Universalitas*, alih bahasa Mujiburrahman, cet. ke-1, (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 5.

<sup>30</sup> Khamami Zada dan Arif B. Arofah, *Diskursus Politik Islam*, hlm. 40. Lihat juga Alî Abdurraziq, *al-Islâm wa Usûl al-Ahkâm*, (Kairo: al-Haiah al-Misrîyah al-Kitâb, t.t.). Bandingkan pula, Ahmad Vaezy, *Nalar Politik Islam*, hlm. 191.

<sup>31</sup> A. Lutfi asy-Syaukani, “Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer,” dalam, *Pemikiran Islam Paramadina*, vol. 1, no. 1, (Juli-Desember 1998), hlm. 63-65.

rasional dan ilmiah. Mereka menolak cara pandang agama dan kecenderungan mistis yang tidak berdasarkan nalar praktis serta menganggap agama dan tradisi adalah masa lalu yang tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman sekarang sehingga harus ditinggalkan.

*Kedua*, tipologi reformistik yang mana tipe ini melakukan reformasi dengan cara penafsiran-penafsiran yang lebih hidup dan cocok dengan tuntutan dan kebutuhan zaman. *Ketiga*, tipologi pemikiran ideal-totalistik. Ciri utama dari tipologi ini adalah sikap dan pandangan idealis terhadap ajaran Islam yang bersifat totalistik. Kelompok ini sangat *committed* dengan aspek religius budaya Islam. Proyek peradaban yang hendak mereka garap adalah menghidupkan kembali Islam sebagai agama, budaya, dan peradaban. Mereka menolak unsur-unsur asing yang datang dari Barat, karena Islam sendiri sudah cukup mencakup tatanan sosial, politik, dan ekonomi.

Dikarenakan kajian tentang munculnya istilah “fundamentalisme Islam” terkait dengan demokrasi, artinya bahwa setiap kelompok fundamentalisme Islam seperti, Hizb al-Tahrîr dan al-Ikhwân al-Muslimûn, lahir dan sangat dipengaruhi dari hegemoni Barat yang mengkomersialkan demokrasi sebagai alternatif untuk mewujudkan cita-cita masyarakat damai dan sejahtera, terlepas bahwa demokrasi itu berasal dari Islam atau tidak, tentunya juga sangat dipengaruhi oleh pendekatan *historis* (sejarah). Pendekatan sejarah tidak hanya menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu, lebih dari itu, peristiwa-peristiwa tersebut dianalisis dengan meneliti sebab-akibat, kemudian dirangkum kembali sehingga dapat

diperoleh pengertian dalam bentuk sintesis yang dapat memberi penjelasan mengenai aspek-aspek:

1. Bagaimana deskripsi peristiwanya.
2. Mengapa peristiwa itu terjadi.
3. Ke arah mana peristiwa itu akan terjadi selanjutnya.

Pendekatan sejarah tersebut tersebut juga tidak lepas dari kajian-kajian yang lain seperti, ilmu-ilmu sosial, karena dalam penulisan sejarah yang deskriptif-analitis, terkait erat dengan masalah kausalitas, faktor-faktor kondisional dan determinan-determinan dari suatu peristiwa, yang mana hal itu bisa dideteksi dengan perspektif sosial (sosiologi) yang *concern* pada pembahasan masalah struktural sosial, konstruksi pengalaman manusia, dan kebudayaan termasuk agama.<sup>32</sup> Pendekatan ini menyumbangkan dua aspek paling penting agar dapat dipahami dengan tepat, yaitu: *pertama*, bahwa perubahan itu merupakan sesuatu yang pasti. *Kedua*, adanya kecenderungan-kecenderungan (*trends*) yang dapat dibaca dengan meneliti proses politik internasional masa lampau, sekarang dan kemudian memproyeksikan kecenderungan itu ke masa depan.<sup>33</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

---

<sup>32</sup> Ahmad Adaby Darban, *Sebuah Pendekatan Sejarah Struktural dan Relevansinya untuk Sejarah Nasional*, oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Investi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta, 1985, hlm. 1-2.

<sup>33</sup> M. Amien Rais, *Politik Internasional Dewasa Ini*, cet. ke-1, (Surabaya: Usaha Nasional, 1989), hlm. 88.

Penelitian ini termasuk penelitian jenis pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Adapun sifat penelitian ini adalah induktif-analitis-komparatif.

## 2. Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data primernya adalah kitab-kitab (buku-buku) yang berkaitan dengan kedua kelompok tersebut. Adapun karya-karya dalam kategori tersebut antara lain: *Ikhwân & Democracy*, *Majmû'ah ar-Rasâil*, *Pemikiran Politik Kontemporer al-Ikhwân al-Muslimun*, *Mafâhîm Hizbut Tahrîr*, *Takattul Hizbî* (*Pembentukan Partai Politik Islam*), *Mengenal Hizbut Tahrîr*. Adapun yang menjadi sumber sekunder adalah kajian-kajian yang membahas tentang demokrasi dan fundamentalisme Islam serta yang membahas kedua kelompok tersebut.

## 3. Analisis Data

Jika data telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis, induktif, dan komparatif.

## 4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio-historis* yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio-kultural dan sosio-politik kedua kelompok tersebut yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan politik dari lingkungannya. Pendekatan historis ini dipengaruhi juga oleh proyeksi kekuatan-kekuatan sejarah dan hubungan-hubungan sejarah melalui masa kini ke arah masa depan. Situasi internasional yang ada sekarang,

dipengaruhi oleh berbagai konflik masa lalu dan oleh prinsip-prinsip hubungan antar negara yang tumbuh sesuai dengan perjalanan waktu.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab antara lain: *bab pertama*, pendahuluan yang meliputi; Latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian ini.

*Bab kedua*, berisi tinjauan umum tentang demokrasi. Kajian ini mengeksplorasi tentang pengertian demokrasi dan sejarahnya beserta pemahamannya sebagai ideologi dan pemikiran. Hal itu tentunya terkait juga dengan pandangan demokrasi dalam pemikiran politik Barat dan demokrasi dalam pemikiran politik Islam. Kontoversi seputar *syûra* dan demokrasi beserta argumen yang melatarbelakinya juga dibahas dalam bab ini.

*Bab ketiga*, diuraikan sekilas tentang Hizb al-Tahrîr dan al-Ikhwân al-Muslimûn dari sejarah kelahiran, pertumbuhan dan perkembangannya. Disamping itu, *manhâj* dan karakteristik gerakan yang menjadi dasar dari pemikiran dan bangunan ideologi kedua gerakan tersebut, diulas panjang lebar dalam sub bab ini. Pemikiran politik kedua gerakan tersebut dalam kaitannya demokrasi juga tidak lupa menjadi fokus utama pembahasan dalam bab ini.

*Bab keempat*, Penyusun melakukan penelitian dan analisis tentang paradigma politik yang dibangun oleh kedua gerakan tersebut dalam kaitannya dengan demokrasi. Pembahasan ini diawali dengan memahami faktor deskripsi geografis

tempat kedua gerakan tersebut lahir dan kondisi perpolitikan sebelum maupun sesudah lahirnya gerakan tersebut. Akhir dari pembahasan bab ini, penyusun memberikan apreseasi terhadap kedua gerakan tersebut kaitannya dengan demokrasi.

*Bab kelima*, penyusun berusaha melacak pola transmisi atau jaringan ulama Timur Tengah ke Indonesia. Dengan demikian, dapat diketahui seberapa besar kontribusi dan pengaruh para ulama beserta alumni Timur Tengah tersebut dengan munculnya beberapa gerakan revivalisme atau fundamentalisme Islam di Indonesia. Akhir dari pembahasan bab ini, penyusun mengulas tentang potret dan implementasi bangunan ideologi dari Hizb al-Tahrir Indonesia (HTI) yang merupakan anak kandung ideologi Hizb al-Tahrir al-Islâmî di Palestina dan gerakan Tarbiyah (PKS) yang merupakan kepanjangan tangan dari al-Ikhwan al-Muslimun di Mesir. *Bab keenam*, merupakan akhir dari penelitian ini yang ditutup dengan kesimpulan dan saran.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan ini maka dapat disimpulkan bahwa gerakan fundamentalisme atau revivalisme Islam merupakan gerakan keagamaan Islam kontemporer. Sebagaimana yang dijelaskan Dekmeijan, kebangkitan Islam (*Islamic Revivalism*) menggambarkan tingginya kesadaran Islam di kalangan umat Islam. Bentuk Islam yang merakyat ini ditunjukkan dengan menyebarluasnya masyarakat yang dipenuhi kebajikan dan persaudaraan-ersaudaraan sufi dan ketaatan yang mencolok untuk mempraktikkan ajaran-ajaran Islam. Pada umumnya, kecenderungan ini ditandai dengan pasivitas politik. Kelompok ini memiliki kesadaran politik yang sangat tinggi dan terkadang harus bermusuhan dengan negara atau pemerintah apabila bertentangan dengan ideologi mereka.<sup>1</sup>

Kelompok yang paling mewakili dari karakter di atas adalah Hizb al-Tahrîr dan al-Ikhwân al-Muslimûn. Kedua kelompok ini merupakan gerakan Islam politik yang mempunyai jumlah anggota yang cukup besar, lahir dan tumbuh di kawasan Timur Tengah. Keduanya berkembang di berbagai negara dan pengaruh politiknya cukup signifikan. Keduanya mempunyai visi atau cita-cita yang sama yakni, menegakkan Daulah Islam dan menerapkan syariah Islam secara total di setiap aspek kehidupan. Namun, dalam hubungannya dengan cara untuk meraih cita-cita tersebut keduanya mempunyai pandangan yang berbeda.

---

<sup>1</sup> John L. Esposito (ed.), *Dinamika Kebangkitan Islam: Watak Proses, dan Tantangan*, alih bahasa Bakri Siregar, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm. 8.

Hizb al-Tahrîr dalam mewujudkan cita-citanya tersebut, menggunakan pola pemikiran ideal-totalistik, yakni mempunyai sikap dan pandangan idealis terhadap ajaran Islam yang bersifat totalistik, dengan menolak unsur-unsur asing yang datang dari Barat. Dengan demikian, Hizb al-Tahrîr menolak secara keseluruhan sistem demokrasi beserta unsur-unsurnya yang dianggap sebagai sistem Barat yang kufur. Penolakan terhadap sistem demokrasi ini adalah suatu yang wajar karena dalam perjalanan sejarahnya, sistem ini hanya dijadikan sebagai alat kekuasaan asing untuk mengeksplorasi dan memperbudak negara-negara yang lemah.

Fakta mencatat, trauma historis (beban sejarah) yang mendalam atas penderitaan, kekalahan, dan kemunduran umat Islam di Palestina khususnya, dan negeri Arab pada umumnya dalam perang Arab-Israel dan dominasi otoritas kekuasaan kolonialis (Barat), telah memunculkan sebuah paradigma baru dalam pemikiran Hizb. Hizb berpandangan bahwa dengan menolak secara total sistem demokrasi dan melangsungkan kembali kehidupan Islam dengan jalan mendirikan Daulah Islâmiyah atau Khilâfah Islâmiyah merupakan solusi atau alternatif terbaik, bila umat Islam tidak ingin terus dikuasai dan dihegemoni oleh kekuasaan asing.

Adapun al-Ikhwân al-Muslimûn mempunyai kecenderungan yang berbeda dengan Hizb al-Tahrîr dalam pandangannya terhadap sistem demokrasi termasuk unsur-unsur yang ada di dalamnya. Al-Ikhwan al-Muslimun menjadikan sistem demokrasi sebagai alat atau kendaraan untuk mewujudkan cita-citanya. Hal ini sangat terkait dengan pola pikir Hasan al-Bannâ sendiri sebagai pendiri Ikhwân

yang lebih bersifat fleksibel dan moderat terhadap perkembangan zaman dan tidak menafikan secara total segala sesuatu yang berasal dari Barat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti demokrasi. Dengan orientasi ideologi yang bersifat gradualis-adaptasionis (*gradualist-adaptasionist*), al-Ikhwân al-Muslimun menjadikan kondisi perpolitikan internal Mesir berperan di dalam memberikan kontribusinya membangun ideologi maupun kerangka berpikirnya tentang demokrasi.

Sistem pemerintahan dan orientasi partai-partai di Mesir yang lebih cenderung ke arah sekulerisme negara, menjadi tantangan bagi al-Ikhwân al-Muslimûn untuk terjun dan melakukan pertarungan dengan partai-partai tersebut dan bersentuhan langsung dengan sistem demokrasi. Di sini dapat dipahami bahwa al-Ikhwân al-Muslimûn menjadikan demokrasi sebagai kendaraan untuk mewujudkan cita-citanya dengan upaya “mengislamkan demokrasi” serta melakukan justifikasi atau mencari pbenaran dalil tentang demokrasi.

Baik Hizb al-Tahrîr maupun al-Ikhwân al-Muslimûn mempunyai kerangka pemikiran dan ideologi yang hampir tersebar ke seluruh dunia Islam, khususnya Indonesia dengan melahirkan gerakan yang hampir sama, sejak 1980-an hingga sekarang. Transmisi gerakan ini ke Indonesia terjadi, melalui modus dan sarana yang beragam. Paling tidak ada empat modus dan sarana dominan yang memiliki andil yang cukup signifikan dalam proses tersebut. *Pertama*, transmisi melalui alumni para alumnus Timur Tengah. *Kedua*, melalui dakwah kampus dengan sistem *usroh*. *Ketiga*, melalui penyebaran buku-buku dan sarana informasi

lainnya. *Keempat*, melalui kontak personal dengan para aktivis gerakan revivalisme Islam di Timur Tengah.

Di Indonesia, pengaruh ideologi dan pemikiran Hizb al-Tahrîr ini diadopsi oleh Hizb al-Tahrîr Indonesia (HTI) sebagai anak kandung ideologi Hizb al-Tahrîr al-Islâmî di Palestina. Gerakan ini dalam praktik demokrasi di Indonesia menolak segala sesuatu yang bukan dari Islam dan berbau Barat, termasuk demokrasi dan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, HTI menolak pemilu, sistem parlemen, dan kepartaian yang berada di bawah kekuasaan *dâr al-harb*. Mereka menganggap bahwa pemerintahan Indonesia merupakan pemerintahan *dâr al-harb* (negara kafir) karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Di samping itu, mereka terus-menerus meneriakkan daulah Islâmiyah dan menentang segala bentuk kapitalisme.

Adapun al-Ikhwân al-Muslimûn menginspirasi munculnya gerakan Tarbiyah di Indonesia. Gerakan ini selanjutnya berafiliasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai alat kepanjangan tangan al-Ikhwân al-Muslimûn yang berada di Mesir untuk memasok gagasan, pemikiran, ideologi, semangat dan metode gerakan kepada masyarakat. Melalui kendaraan demokrasi, mereka terlibat aktif dalam percaturan politik di Indonesia, seperti mendirikan partai politik, membolehkan anggotanya masuk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta berperan langsung dalam pemilu. Berbeda dengan HTI, gerakan ini bersifat lebih fleksibel dan moderat dengan memasukkan anggotanya melalui institusi negara atau pemerintah untuk mewarnainya dengan warna Islami.

## B. Saran

Di sini dapat terlihat jelas bahwa transmisi pemikiran, ideologi, dan *manhâj* kedua gerakan di atas, nyaris tidak mengalami modifikasi atau adaptasi dengan konteks Indonesia. Apa yang berasal dari Timur Tengah di *copy-paste* secara mentah-mentah di Indonesia. Hal ini tentunya memunculkan persoalan serius yang tidak mudah di atasi ketika bersentuhan langsung dengan problem keindonesiaan yang memiliki kultur dan perilaku masyarakat yang berbeda. Oleh karena itu, berbagai pemikiran, ideologi dan metode gerakan yang diadopsi dari Timur Tengah mesti diadaptsikan dengan konteks tersebut. Dengan demikian, transformasi pemikiran, ideologi serta metode gerakannya agar lebih disesuaikan dengan konteks Indonesia yang tentu berbeda dengan Timur Tengah.

Di samping itu, mewujudkan cita-cita negara Islam (Khilâfah Islâmiyah) melalui jalur politik, menurut hemat penyusun merupakan suatu hal yang mustahil terwujud. Sejarah Islam mencatat bahwa pendirian Negara Islam Madinah yang didirikan oleh Rasulullah saw. dan para sahabatnya lebih mengutamakan kepada dakwah tauhid (mengesakan Tuhan), yaitu bagaimana mengeluarkan seseorang dari kegelapan kepada cahaya iman, dari kemaksiatan kepada ketaatan, serta mengeluarkan manusia dari kebodohan kepada ilmu, bukan kepada politik, karena Islam diturunkan oleh Tuhan sebagai agama tetapi diakui bahwa kedua gerakan tersebut kemudian membelokkannya kepada politik.

## DAFTAR PUSTAKA

### **AL-Quran/Tafsir**

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI, 1971.

Ridâ, Muhammad Rasyîd, *Tafsîr al-Manâr*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.t.

### **Ensiklopedi/Kamus**

Anis, Ibrâhîm (et.al.), *al-Mu'jam al-Wâsît*, Mesir: t.p., 1972

Dahlan, Abdul Aziz (et.al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Djuaeni, Napis M., *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia: Istilah Politik, Ekonomi*, Jakarta: Teraju, 2006.

Esposito, John L. (ed.), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press, 1995.

Haldane, David, dkk., *Oxford and Oxford English*, New York, Oxford University Press, 1995.

Manzûr, Ibnu, *Lisân al-'Arab al-Muhît*, Beirut: Dâr Sadir, 1955

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

### **Hadis/Syarah Hadis/Ulûmul Hadis**

Baihaqî, Abî Bakr Ahmad bin Husein al-, *as-Sunan al-Kubrâ*, Beirut: Dâr al-Ma'rifat, 1988.

Bukhârî, Abû 'Abdillâh Muhammad bin Ismâ'il al-, *Sahîh al-Bukhârî*, 4 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Mâjah, Abû 'Abdillâh Muhammad ibn Yazid ibn, *Sunan Ibn Mâjah*, edisi M.F. 'Abd al-Bâqî, Mesir: 'Isâ al-Bâbî al-Halabî wa Syurakâh, 1956.

Muslim, al-Hajjaj a-Qusyairî al-Naisaburî, *Sahîh Muslim*, edisi F. Amira Zrein Matraji, Beirut: Dâr al-Fikr, 1993.

### **Lain-lain**

Abaza, Mona, *Pendidikan Islam dan Pergeseran Orientasi Studi Kasus Alumni al-Azhar*, alih bahasa S. Harlinah, Jakarta: LP3ES, 1999.

Abbas, Tahir (ed.), *Islamic Political Radicalism: A European Perspective*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2007.

Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Abdullah, Taufik dan Shiddique, Sharon (ed.), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Abdurraziq, Alî, *al-Islâm wa Ushûl al-Ahkam*, Kairo: al-Haiah al-Misrîyah al-Kitâb, t.t.

Affandi, Bisri, *Syaikh Ahmad Syurkati (1874-1943): Pembaharu & Pemurni Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999.

Arifin, Syamsul, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalis: Pengalaman Hizbu al-Tahrîr Indonesia*, Malang: UMM Press, 2005.

Amran, Rusli, *Sumatra Barat hingga Plakat Panjang*, Jakarta: Sinar Harapan, 1981.

Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik: Perbandingan antara Islam dan Barat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Aziz, Imam M.dkk, *Agama, Demokrasi, dan Keadilan*, Jakarta: Gramedia, 1993.

Aziz, Abdul, Tolkhah, Imam dan Soetarman (ed.), *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989

Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, cet. ke-3, Bandung: Mizan, 1995

\_\_\_\_\_, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996.

Bannâ, Hasan al-, *Majmû'ah ar-Rasâ'il al-Imâm asy-Syahîd Hasan al-Bannâ*, Iskandariah: Dâr ad-Da'wah, 1988.

- Bakar, Abu, *Berebut Tanah Suci Palestina*, Yogyakarta: Insan Madani, 2008.
- Budiardjo, Miriam, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1995.
- Clact, George (ed.), *Demokrasi*, ttp: Office Of International Information Programs U.S. Department of State, 2001.
- Dahl, Robert A., *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, alih bahasa A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Demokrasi dan Para Pengritiknya*, alih bahasa A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- Darban, Ahmad Adarbi, *Sebuah Pendekatan Sejarah Struktural dan Relevansinya untuk Sejarah Nasional*, makalah pada Seminar Sejarah Nasional IV di Yogyakarta, 16-19 Desember 1985, yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Investi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta.
- Daya, Burhanuddin, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatra Thawalib*, cet. ke-2, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1995.
- Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunni dan Syiah: Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad 20*, Bandung: Pustaka Mizan, 1988.
- Esposito, John L., *Islam Warna-Warni: Ragam Ekspresi Menuju "Jalan Lurus" (al-Sirât al-Mustaqîm)*, alih bahasa Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Ancaman Islam: Mitos dan Realitas*, Bandung: Mizan, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Islam dan Perubahan Sosial-Politik di Negara yang sedang Berkembang*, alih bahasa Wardah Hafidz, cet. ke-1, Yogyakarta: PLP2M, 1985.
- \_\_\_\_\_, dan Voll, John O., *Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek*, alih bahasa Rahman Astuti, Bandung: Mizan, 1999.
- \_\_\_\_\_, dan Donohue, John J. (ed.), *Islam in Transition Muslim Perspective*, New York: Oxford University Press, 2007.
- \_\_\_\_\_, (ed.), *Langkah Barat Menghadang Islam*, alih bahasa Dina Mardiya dan Amri Fakhriani, Yogyakarta: Jendela, 2004.

\_\_\_\_\_, (ed.), *Dinamika Kebangunan Islam: Watak Proses, dan Tantangan*, alih bahasa Bakri Siregar, Jakarta: Rajawali Press, 1987.

Fukuyama, Francis, *The End of History and the Last Man*, New York: The Free Press, 1992.

Gafar, Affan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Ghazalî, Abdul Hamîd al-, *Peta Pemikiran Hasan al-Bannâ: Meretas Jalan Kebangkitan Islam*, alih bahasa Wahid Ahmadi dan Jasiman, (Solo: Era Intermedia, 2001.

Haddad Alwî bin Thahîr al-, *Sejarah Masuknya Islam di Timur Jauh*, alih bahasa Ali Yahya, cet. ke-1, (Jakarta: Lentera, 2001.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Andi Offset, 1990.

Hawwâ, Sa'îd, *Membina Angkatan Mujahid: Studi Analitis atas Konsep Dakwah Hasan al-Bannâ dalam Risâlah Ta'âlim*, alih bahasa Abu Ridho dan Wahid Ahmadi, Solo: Era Intermedia, 2005.

Held, David, *Models of Democracy*, California: Stanford University Press, 1996

Hidayat, Komaruddin dan Gaus, Ahmad AF, *Islam, Negara & Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.

Hunter, Shireen T. (ed.), *The Politics of Islamic Revivalism*, Bloomington and Indianapolish: Indiana University Press, 1988.

Huntington, Samuel P., *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, alih bahasa Asril Marjohan, Jakarta: Pustaka Grafiti Utama, 1995.

Hasan, Noorhaidi, *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-orde Baru*, Jakarta: LP3ES, 2008.

Husin, Asna, "Philosophical and Sociological Aspects of Da'wah: A Study of Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia," Disertasi Ph.D, Columbia University, 1988

Huwaidî, Fahmi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, alih bahasa M. Abd. Ghofar, Bandung: Mizan, 1996.

Jabîr, Husein bin Muhsîn bin Alî, *Membentuk Jamâ'atul Muslimîn*, alih bahasa Abu Fahmi dan Ahmad Ilmuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.

- Jabirî, Muhammad Abed al-, *Syura: Tradisi Partikularitas Universalitas*, alih bahasa Mujiburrahman, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Jainuri, Ahmad (ed.), *Terorisme dan Fundamentalisme Agama: Sebuah Tafsir Sosial*, cet. ke-1, Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Kailanî, Musa Zaid al-, *Harâkah Islâmiyah fî al-Urdûn*, Amman: Dâr al-Basyâr li Nasyr wa Tawzi', 1990.
- Kamil, Sukron, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Karîm, Khalîl 'Abdul, *Syari'ah Sejarah Perkelahian dan Pemaknaan*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Lucas, Henry S., *Sejarah Peradaban Barat Abad Pertengahan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jemâ'at al-Islâmî (Pakistan)*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Mahfud MD., Moh, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 1999.
- Mahmûd, Alî Abdul Halîm, *Ikhwânl Muslimîn Konsep Gerakan Terpadu*, alih bahasa Syafril Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Perangkat-perangkat Tarbiyah Ikhwânl Muslimîn*, alih bahasa Wahid Ahmadi dkk., Solo: Era Intermedia, 2008.
- Maudûdî, Abû al-Alâ al-, *Sistem Politik Islam: Hukum dan Konstitusi*, alih bahas Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Political Theory of Islam*, Karachi: Maktaba el-Islami, t.t.
- Meij, Dick Van Der (ed.), *Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam*, alih bahasa Somardi, Jakarta: INIS, 2003.
- Mitchell, Richard Paul, *Masyarakat al-Ikhwânl Muslimîn: Gerakan Dakwah al-Ikhwânl di Mata Cendikiawan Barat*, alih bahasa Safrudin Edi Wibowo, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Mubarak, M. Zaki, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007.

- Mulkhan, Abdul Munir, *Menggugat Muhammadiyah*, cet. ke1, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000.
- Mun'im, Abdul DZ. (ed.), *Islam di Tengah Arus Transisi*, cet. ke-1, Jakarta: Kompas, 2000.
- Nabhânî, Taqîyuddîn an-, *Mafâhîm Hizbut Tahrîr*, tt: Hizbut Tahrîr, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Pembentukan Partai Politik Islam*, alih bahasa Zakariya dkk., Jakarta: HTI Press, 2007.
- Nashir, Haedar “Gerakan Islam Syari’at: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia,” Disertasi Doktor Universitas Gadjah Mada, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Manifestasi Gerakan Tarbiyah: Bagaimana Sikap Muhammadiyah?*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980.
- Osman, Fathi, *Ikhwân & Democracy: Ikhwânul Muslimîn Membedah Demokrasi*, alih bahasa Nasmany L. Anas, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Pusat Studi Khazanah Ilmu-ilmu Islam (PSKII), *Materi Dasar Islam*, Bogor: PSKII, 2001.
- Qardâwî, Yûsuf al-, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islâm Makânatihâ, Mu'allimihâ, Tabî’atihâ, Mufwafiqqifîhâ min al-Dîmuqrâtiyah wa al-Ta’addudiyah wa al-Mar’ah wa Ghori al-Muslimîn*, Mesir: Dâr al-Syurûq, 1997
- \_\_\_\_\_, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As’ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Tarbiyah Politik Hasan al-Bannâ: Referensi Gerakan Dakwah di Kancah Politik*, alih bahasa M. Lili Nur Aulia, Jakarta: Arah Press, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, alih bahasa Rofi’ Munawar dan Tajuddin, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Rahnema, Ali (ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, alih bahasa Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 1996.
- Rahman, Fazlur, *Al-Islam*, New York: Doubleday & Company. Inc, 1968.

- Rahmat, M. Imdadun, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur-Tengah ke Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Râis, Diauddîn M. ar-, *Teori Politik Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rais, M. Amien, *Politik Internasional Dewasa Ini*, Surabaya: Usaha Nasional, tt.
- Revitch, Diane dan Thernstrom, Abigail (ed.), *Demokrasi Klasik & Modern*, alih bahasa Hermoyo, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Ropi, Ismatu dan Kusuma (ed.), *Belajar Islam di Timur Tengah*, Jakarta: Departemen Agama RI, tt.
- Ross, Dennis, *The Missing Peace the Inside Story of the Fight for Middle East Peace*, New York: tp., 2005
- Rosyada, Dede, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education); Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Roy, Oliver, *Gagalnya Islam Politik*, alih bahasa Harimurti dan Qomarudin SF., Jakarta: Serambi, t.t.
- Ruthven, Malise, *Fundamentalism: The Search for Meaning*, New York: Oxford University Press, 2004.
- Samarah, Ihsân, *Biografi Singkat Syaikh Taqîyuddîn an-Nabhânî*, alih bahasa M. Shiddiq al-Jawî, Bogor: al-Azhar Press, 2002.
- Sargent, Lymen Tower, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer: Sebuah Analisis Komparatif*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1987.
- Schmandt, Henry J., *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Shihab, Alwi, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, alih bahasa Ihsan Ali Fauzi, Bandung: Mizan, 1998.
- Sihbudi, Riza dan Turmudi, Endang (ed.), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Eksistensi Palestina: Di Mata Teheran dan Washington*, Bandung: Mizan, 1992.

- \_\_\_\_\_, *Menyandera Timur Tengah: kebijaksanaan AS dan Israel atas Negara-negara Muslim*, Jakarta: Mizan, 2007.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Somervell (ed.), *Western Civilization*, Nottingham: International University Society, t.t.
- Suhelmi, Ahmad, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*, cet. ke-1, Jakarta: Teraju, 2002.
- Suryanegara, Ahmad Mansur, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Bandung: Mizan, 1996.
- Suseno, Franz Magnis (ed.), *Agama dan Demokrasi*, Jakarta: P3M, 1992.
- Syam, Firdaus, *Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya terhadap Dunia Ke-3*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Syaukani, Luthfi asy-, “Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer,” dalam, *Pemikiran Islam Paramadina*, vol. 1, no. 1, Juli-Desember 1998.
- Syawî, Taufiq asy-, *Demokrasi Bukan Syûrâ*, alih bahasa Djamaluddin Z.S., Jakarta: Gema Insani Press, t.t.
- Tafsir, Ahmad, *Filsafat Umum: Akal dan Hati sejak Thales sampai Capra*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Taher, Elza Peldi (ed.), *Demokratisasi Politik, Budaya, dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1994.
- Tahrîr, Hizbut, *Mengenal Hizbut Tahrîr dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrîr*, alih bahasa Abu Afif dan Nurkhalis, Bogor: Pustaka Tharîqul Izzah, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Struktur Negara Khilâfah: Pemerintahan & Administrasi*, alih bahasa Yahya A.R., Jakarta: HTI Press, 2007.
- \_\_\_\_\_, Indonesia, *Kritik Islam terhadap UUD 1945 dan Rancangan UUD Islam*, Jakarta: HTI, 2000
- Thaha, Idris, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais*, Jakarta: Teraju, 2005.
- Tebba, Sudirman, *Islam Pasca Orde Baru*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 2001.

- Tibi, Bassam, *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*, alih bahasa Imran Rasyidi dkk., Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Islam and Cultural Accommodation of Social Change*, Oxford: Westview Press, 1991.
- Tholhah, Muhammad Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta: Lantabara Press, 2004.
- Touraine, Alain, *Critique of modernity*, UK Oxford: Blackwell, 1995
- Uhlen, Andres, *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, alih bahasa Rofik Suhud, Bandung: Mizan, 1998.
- Vaezy, Ahmad, *Agama Politik: Nalar Politik Islam*, alih bahasa Ali Syahab, Jakarta: Citra, 2006.
- Voll, John O., *Politik Islam Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*, alih bahasa Ajat Sudrajat, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Wa'î, Yûsuf, Taufik al-, *Pemikiran Politik Kontemporer al-Ikhwân al-Muslimûn: Studi Analitis, Observatif, Dokumentatif*, alih bahasa Wahid Ahmadi dan Arwani Amin, Solo: Era Intermedia, 2003.
- Yasmin, Ummu (peny.), *Agenda Tarbiyah: Panduan Kurikulum Da'i dan Murabbi*, Solo, Media Insani, 2003.
- Zada, Khamami dan Arofah, Arif B., *Diskursus Politik Islam*, Jakarta: LSIP, 2003.
- Zallûm, Abdul Qadîm, *Demokrasi Sistem Kufur*, alih bahasa Umar Faruq, t.t.p., Bursa Ilmu Indonesia, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Konspirasi Barat Meruntuhkan Khilâfah Islâmiyah*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001.
- Zarkasy, Hamid Fahmi, *Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan Bersama Missionaris Orientalis dan Kolonialis*, cet. ke-1, Ponorogo: CIOS-ISID Gontor, 2008

### **Majalah, Jurnal, Buletin, Surat Kabar, dan Internet**

Buletin *al-Islam*, edisi 019/ tahun VII.

Bulletin *al-Islam*, edisi 65/ tahun VIII.

- Jurnal *al-Manâhij*, Vol. 1:2, Juli-Desember 2007.
- Jurnal *al-Syir'ah*, Vol. 36, No. 1, 2002.
- Koran *Kompas*, 27 Februari 2005.
- Koran *Media Indonesia*, 4 Juni 2001.
- Koran *Tempo*, 26 September 2005.
- Majalah *asy-Syariah*, Vol. 2, No. 22, 2006.
- Majalah *al-Wa'ie*, No. 61, Th. Ke-6, 1-30 September 2005.
- Majalah *al-Wa'ie*, No. 68, Th. Ke-4, 1-30 April 2006.
- Majalah *al-Wa'ie*, No. 68, Th. Ke-6, 1-31 Agustus 2006.
- Majalah *al-Wa'ie*, No. 74, Th. Ke-7, 1-30 Oktober 2006.
- Majalah *al-Wa'ie*, No. 75, Th. Ke-7, 1-30 November 2006.
- Majalah *al-Wa'ie*, No. 79, Th. Ke-7, 1-31 November 2007.
- “Palestina,”<http://id.wikipedia.org/wiki/Palestina>, akses 20 November 2008.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/konflik\\_israel-palestina](http://id.wikipedia.org/wiki/konflik_israel-palestina), akses 24 November 2008.
- [http://en.wikipedia.org/wiki/Sykes-Picot\\_Agreement](http://en.wikipedia.org/wiki/Sykes-Picot_Agreement), akses 24 November 2008.
- [http://en.wikipedia.org/wiki/1929\\_Palestine\\_Riots](http://en.wikipedia.org/wiki/1929_Palestine_Riots), akses 24 November 2008.
- [http://en.wikipedia.org/wiki/1936%E2%80%931939\\_Arab\\_revolt\\_in\\_Palestine](http://en.wikipedia.org/wiki/1936%E2%80%931939_Arab_revolt_in_Palestine).
- [http://id.wikipedia.org/wiki/konflik\\_Israel-Palestina](http://id.wikipedia.org/wiki/konflik_Israel-Palestina), akses 24 November 2008.
- Mesir,” <http://id.wikipedia.org/wiki/Mesir>, akses 20 November 2008.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Buku-Putih\\_1939](http://id.wikipedia.org/wiki/Buku-Putih_1939), akses 24 November 2008.
- Burhanuddin, “Islamisme, PKS, dan Representasi Politik Perempuan,” dalam <http://islamlib.com/id/artikel/islamisme-pks-dan-representasi-politik-perempuan>, akses 19 Desember 2008.
- <http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/14/19525366/sby.zero.option.pks.lirik.m> egawati, akses 19 Desember 2008.

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA

#### 1. **Abû al-‘Alâ al-Maudûdî**

Ia dilahirkan di Aurangabad, Hyderabad, India, pada 25 September 1903 (3 Rajab 1321 H). Pendidikan formalnya di Madrasah Faqâniyat, kemudian ia pindah ke Dâr al-Ulûm. Karena kesulitan biaya, akhirnya ia putus dari pendidikan formalnya dan belajar secara otodidak. Pada 1941, ia bersama-sama dengan 70 teman-temannya, mendirikan suatu organisasi yang diberi nama Jâmi’ah Islâmiyah, suatu organisasi yang lebih menampakkan gerakan ideologi dari pada gerakan politik.

#### 2. **Muhammad Rasyîd Ridâ**

Ia dilahirkan di kota Tripoli sebelah utara Beirut, Libanon, pada 1865. Pendidikan formalnya di Madrasah Ibtida’iyah Rasyîdah di Tripoli. Kemudian pada 1883 memasuki Madrasah Wathaniyah Islamiyah di Beirut. Pendidikan tingginya ia selesaikan di Universitas al-Azhar, Mesir. Ia banyak terinspirasi dan terpengaruh oleh gerakan pembaharuan Muhammad Abduh, salah seorang gurunya di al-Azhar dan Abû al-‘Alâ al-Maudûdî.

#### 3. **Yûsuf al-Qardâwî**

Ia dilahirkan di Shaft at-Turab, Mesir, pada 9 September 1926. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah di sekolah cabang al-Azhar. Setelah itu, ia masuk Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar sampai meraih gelar doktor. Al-Qardâwî salah seorang pengagum pemikiran Hasan al-Bannâ, salah seorang pendiri al-Ikhwân al-Muslimûn hingga akhirnya ia terlibat aktif dalam gerakan tersebut. Pada tahun 1977 al-Qardâwî memimpin dan menjadi dekan pertama di Fakultas Syari’ah dan Studi Islam di Qatar. Pada tahun 1413 H, ia mendapat penghargaan King Faisal Award karena jasanya di bidang keislaman.

# CURRICULUM VITAE

## Prestasi:

- Juara 1 Lomba Matematika Tingkat SLTP se-Kabupaten Sleman. (1998).
  - Juara 3 MSQ tingkat SLTP se-Sleman Barat (1997).
  - Juara 1 Umum STTB dan NEM EBTANAS terbaik se-SMP 1 Sleman (1998).
  - Rangking 1 Try-Out UMPTN se-Jogja-Klaten diselenggarakan oleh Bimbingan Belajar Neutron Yogyakarta di Hall Kridosono (2001).
  - Rangking 1 Try-Out UMPTN yang diselenggarakan Keluarga Alumni Muslim SMA 3 Yogyakarta bekerjasama dengan Bimbingan Belajar Nurul Fikri (2001).

## Organisasi:

- Ketua Umum Rohis SMA 1 Yogyakarta (1999-2000).
  - Koordinator Dakwah dan Kajian SKI al-Hadid Teknik Mesin-Industri UGM (2002-2003).
  - Koordinator Tim Kreatif Keluarga Alumni Muslim (KSAI) SMA 1 Yogyakarta (2001-2002).
  - Koordinator Devisi Pendidikan Karang Taruna Padukuhan Ganjuran (2005-keluar).
  - Ketua Remaja Masjid Jami' al-Muttaqien Medari (2005-2008).
  - Sekretaris Takmir Masjid Jami' al-Muttaqien Medari (2008-sekarang).
  - Bendahara Paguyuban Ojek Medari (POM) (2005-sekarang).

## Pekerjaan:

- Tukang Parkir (2002-2003)
  - Tukang Ojek (2004-sekarang)
  - Dosen Privat Matematika SD, SMP, SMA (2001-sekarang)
  - Fund Rising Dompet Peduli Umat Darut Tauhid (2008)